

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP *OVERMACHT* DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN USAHA PRODUKTIF MODAL VENTURA (Studi Pada PT. Sarana Lampung Ventura)

**Oleh:
M. FARUQ AMMAR**

Modal ventura khususnya PT SLV melalui perjanjian pembiayaan sangat berperan krusial dalam mendukung usaha produktif seperti UMKM. Namun, risiko *overmacht* (keadaan memaksa) menjadi ancaman serius yang menghambat pemenuhan prestasi oleh Pasangan Usaha, terutama pasca-peristiwa luar biasa seperti pandemi. Terdapat dua permasalahan hukum yang diangkat yaitu pengaturan hukum mengenai *overmacht* dalam suatu Perjanjian Pembiayaan usaha produktif maupun peraturan perundang-undangan tertentu dan bentuk implementasi terhadap pengaturan *overmacht* dalam suatu Perjanjian Pembiayaan usaha produktif maupun peraturan perundang-undangan tertentu.

Jenis penelitian ini dalam aspek normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Kemudian, pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk mengkaji regulasi yang berlaku, serta bertujuan untuk menganalisis implementasi nyata dari peraturan dan kasus tersebut. bahan hukum primer (KUHP, data, regulasi OJK) dan data empiris (wawancara, analisis dokumen internal).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT SLV menerapkan pengaturan *overmacht* pada klausul perjanjian pembiayaan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku seperti POJK. Kemudian, implikasi yuridisnya adalah regulasi OJK diharapkan dapat menjadi dasar untuk pengaturan terhadap penyelesaian restrukturisasi mengenai penerapan *overmacht* Relatif dalam industri modal ventura untuk memberikan landasan hukum yang lebih kokoh dalam pengambilan Keputusan. Dengan demikian, implementasi pada POJK digunakan sebagai dasar ketentuan permohonan restrukturisasi disertai bukti-bukti yang sah, serta menunjukkan komitmen untuk melanjutkan prestasi setelah keadaan memaksa berakhir.

Kata Kunci: Modal Ventura, *Overmacht*, Perjanjian Pembiayaan, Restrukturisasi.

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF OVERMACHT (FORCE MAJEURE) IN PRODUCTIVE BUSINESS FINANCING AGREEMENTS OF VENTURE CAPITAL (A Study at PT. Sarana Lampung Ventura)

By:

M. FARUQ AMMAR

Venture capital, particularly through PT SLV's financing agreements, plays a crucial role in supporting productive enterprises such as MSMEs. However, the risk of overmacht poses a serious threat that hinders the fulfillment of obligations by Business Partners, especially following extraordinary events like a pandemic. This study addresses two legal issues: the legal regulation of force majeure within productive business financing agreements and specific legislation, and the implementation of these force majeure provisions within such agreements and relevant laws.

This research employs a normative-empirical legal research method with a descriptive-analytical approach. The study utilizes both a statute approach and a case approach to examine prevailing regulations and analyze their practical implementation. The data sources consist of primary legal materials, such as the Indonesian Civil Code and Financial Services Authority regulations, as well as empirical data obtained through interviews and internal document analysis.

The research findings indicate that PT SLV incorporates overmacht provisions into its financing agreement clauses in accordance with prevailing laws and regulations, such as OJK Regulations. Consequently, the legal implication is that OJK regulations are expected to serve as a framework for restructurisation resolving the application of relative overmacht within the venture capital industry, providing a firmer legal basis for decision-making. Furthermore, the implementation of POJK serves as the basis for restructuring requests, provided they are supported by valid evidence and demonstrate a commitment to fulfilling obligations once the overmacht event has subsided.

Keywords: *Financing Agreement, Overmacht, Rectructuring, Venture Capital.*